

Cultural Preservation in Education: Batak Day Upaya Dekolonisasi Pendidikan di Sekolah Kabupaten Samosir Sumatra Utara Tahun 2018-2024

Maulida Fitria^{1✉}

¹Magister Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia.

✉Corresponding Author: Maulidafitria2003@mail.ugm.ac.id

Article Info	ABSTRACT
Timeline <i>Accepted</i> : 14/01/2026 <i>Revised</i> : 27/06/2026 <i>Online</i> : 31/07/2026 <i>Published</i> : 31/07/2026	<i>Education plays a strategic role in the preservation of local culture and the formation of students' identities, especially amid the trends of globalization and the homogenization of knowledge. This study aims to analyze the Batak Day program as a form of local cultural preservation and an effort toward the decolonization of education in schools in Samosir Regency, North Sumatra, during the 2018–2024 period. This study employs a historical research method that includes the stages of theme selection, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. During the heuristic stage, data were collected through field observations; the author conducted a one-month community service program at SMP Negeri 3 in Harian Subdistrict, Samosir Regency, to gather data by observing the implementation of Batak Day, which was then supplemented by a review of books, scientific journal articles, and relevant educational policy documents. The data were analyzed through source criticism, interpretation, and historical writing by integrating findings from field observations and literature reviews within the context of the history of education, policy decentralization, and the decolonization of knowledge. The research findings indicate that Batak Day serves as an educational space that revives the use of the Batak language, symbols, and cultural practices within the school environment. This program not only contributes to the preservation of local culture but also strengthens students' cultural identity and represents a form of education that values local wisdom amid the dominance of a standardized educational paradigm. This study concludes that the integration of local culture into formal education is an effective strategy for strengthening cultural identity while realizing an education system that is culturally equitable and knowledge-sovereign.</i>
Keyword: <i>Batak Day, Culture-based Education, Decolonization of Education, Decentralization, Local Identity</i>	

Kata Kunci:
Batak Day, Pendidikan
Berbasis Budaya,
Dekolonisasi Pendidikan,
Desentralisasi, Identitas
Lokal

A B S T R A K

Pendidikan memiliki peran Strategis dalam pelestarian budaya lokal dan pembentukan identitas peserta didik, terutama di tengah arus globalisasi dan homogenisasi pengetahuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis program *Batak Day* sebagai bentuk pelestarian budaya lokal dan upaya dekolonisasi pendidikan di sekolah-sekolah Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, pada periode 2018–2024. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan pemilihan tema, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, penulis melaksanakan pengabdian masyarakat selama satu bulan di SMP Negeri 3 Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, untuk memperoleh data melalui observasi terhadap pelaksanaan *Batak Day*, yang kemudian diperkaya dengan penelusuran buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Data dianalisis melalui kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah dengan mengintegrasikan temuan observasi lapangan dan studi pustaka dalam konteks sejarah pendidikan, desentralisasi kebijakan, serta dekolonisasi pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Batak Day* berfungsi sebagai ruang pendidikan yang menghidupkan kembali penggunaan bahasa, simbol, dan praktik budaya Batak di lingkungan sekolah. Program ini tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal, tetapi juga memperkuat identitas kultural peserta didik serta menjadi bentuk implementasi pendidikan yang menghargai



Jurnal Pendidikan Sejarah
work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

kearifan lokal di tengah dominasi paradigma pendidikan yang seragam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi budaya lokal ke dalam pendidikan formal merupakan strategi yang efektif untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mewujudkan pendidikan yang berkeadilan budaya dan berdaulat secara pengetahuan.

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi sebagai ruang untuk menanamkan nilai, membentuk identitas, dan memperkuat kebudayaan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, pendidikan seharusnya tidak hanya menanamkan nilai-nilai nasional, tetapi juga memberikan ruang bagi berkembangnya identitas, bahasa, dan pengetahuan lokal (Prasetiawati, 2017). Perspektif yang sejalan dengan konsep dekolonisasi pendidikan, upaya menempatkan kembali pengetahuan, bahasa, dan budaya lokal sebagai bagian yang setara dalam proses pembelajaran setelah lama berada di bawah dominasi paradigma pendidikan yang berorientasi Barat dan cenderung menyeragamkan praktik Pendidikan (Futaqi, 2018). Di tengah arus globalisasi yang mendorong homogenisasi budaya, dekolonisasi pendidikan menjadi strategi untuk memperkuat identitas budaya masyarakat melalui pendidikan formal. Salah satu implementasi nyata dari upaya tersebut adalah program Batak Day di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara. Program ini mengintegrasikan penggunaan bahasa Batak, pakaian adat, tarian, musik, serta berbagai simbol budaya Batak ke dalam aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga lembaga pendidikan tidak hanya

berperan sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal (Nababan, 1991).

Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan dinamika politik kolonial, nasional, serta regional. Sejak awal abad ke-20, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran formal, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan struktur sosial dan pengendalian politik. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda (1900–1930) (Suwignyo, 2019), pendidikan dirancang sebagai alat hegemoni kekuasaan yang memisahkan antara penduduk Eropa dan pribumi. Sekolah-sekolah seperti *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) dan *Europeesche Lagere School* (ELS) hanya diperuntukkan bagi kelompok sosial tertentu, sementara anak-anak pribumi memperoleh akses yang terbatas pada sekolah rakyat dengan mutu pendidikan yang jauh di bawah standar sekolah Eropa. Bahasa Belanda digunakan sebagai simbol status sosial dan kemajuan, sedangkan bahasa daerah serta pengetahuan lokal dianggap tidak memiliki nilai ilmiah untuk diajarkan di ruang sekolah (Sari & Yanti, 2023).

Krisis ekonomi global pada dekade 1930-an mengharuskan pemerintah meninjau ulang kebijakan Pendidikan (Suwignyo, 2013). Dalam konteks efisiensi anggaran dan meningkatnya kesadaran terhadap peran masyarakat pribumi, pemerintah menerapkan kebijakan *indigenisatie* atau indigenisasi. Melalui kebijakan ini, dilakukan perekrutan guru-guru lokal, penggunaan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, serta pengakuan terhadap pendidikan *vernacular* di tingkat dasar. Meskipun motivasi bersifat pragmatis, kebijakan yang dilakukan membuka ruang bagi pendidikan

yang lebih terhubung dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal.

Perubahan orientasi pendidikan kembali terjadi pada masa pendudukan Jepang (1942–1945). Sistem pendidikan dijadikan sarana indoktrinasi politik untuk menanamkan ideologi Asia Timur Raya. Pendidikan diarahkan untuk membentuk kesetiaan terhadap kekaisaran Jepang, menggantikan orientasi kolonial yang sebelumnya berpusat pada Belanda. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan nasional dikembangkan dengan semangat membangun identitas kebangsaan. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar tunggal di seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini berhasil memperkuat kohesi nasional, namun di sisi lain, secara perlahan menggeser posisi bahasa daerah menjadi sekadar pelengkap kurikulum. Dalam praktiknya, pendidikan nasional pascakemerdekaan masih berpusat di Jakarta dan mencerminkan pandangan bahwa keseragaman merupakan prasyarat kemajuan bangsa.

Krisis moneter tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah kebijakan pendidikan Indonesia. Krisis Moneter tidak hanya mengguncang sistem ekonomi dan politik, tetapi juga menggoyahkan legitimasi negara dalam mengelola pembangunan. Runtuhnya Orde Baru membuka jalan bagi reformasi struktural di berbagai bidang, termasuk Pendidikan (Safei & Hudaidah, 2020). Jika kebijakan indigenisasi pada dekade 1930-an muncul dari pertimbangan ekonomi kolonial, maka reformasi pendidikan pada akhir 1990-an lahir dari tuntutan sosial-politik akan demokratisasi dan pemerataan. Pendidikan tidak lagi dimaknai sebagai domain eksklusif negara pusat, tetapi sebagai ruang partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 1999) menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan, termasuk sektor pendidikan. Kebijakan ini menandai berakhirnya sistem pendidikan yang sebelumnya sangat tersentralisasi pada masa Orde Baru serta membuka ruang bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2004) dan revisinya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Presiden Republik Indonesia, 2008), yang semakin menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari penguatan identitas daerah. Salah satu implementasi kebijakan tersebut adalah lahirnya berbagai inovasi pendidikan berbasis budaya lokal, termasuk program *Batak Day* di Kabupaten Samosir yang memanfaatkan pendidikan formal sebagai media pelestarian bahasa, budaya, dan pengetahuan masyarakat Batak.

Berbagai penelitian telah membahas pelestarian budaya Batak dalam konteks pendidikan dan kebahasaan. (Hutahayan & Nainggolan, 2026) menunjukkan bahwa program *Batak Day* berperan dalam memperkuat karakter peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai budaya Batak di sekolah dasar. Penelitian (Yuhdi et al., 2024) menyoroti pengaruh

penguasaan bahasa Batak terhadap kemampuan berbahasa Indonesia, sedangkan (Lubis et al., 2025) menjelaskan bahwa bahasa Batak Toba memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan pengetahuan tradisional masyarakat. Penelitian (Heriando H. Manik et al., 2024) menegaskan peran sekolah adat sebagai institusi pelestarian kebudayaan Batak Toba. Di sisi lain, (Prasetiawati, 2017) menekankan pentingnya pendidikan multikultural dalam mengakomodasi keberagaman budaya di Indonesia, sementara (Santos, 2016) dan (Seats, 2022) mengembangkan perspektif dekolonisasi pengetahuan sebagai kritik terhadap dominasi epistemologi Barat dalam sistem Pendidikan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan masih mengkaji pelestarian budaya, bahasa, atau pendidikan karakter secara terpisah. Belum banyak kajian yang menempatkan program *Batak Day* sebagai praktik dekolonisasi pendidikan dengan menghubungkan implementasinya pada tingkat sekolah dengan konteks historis pendidikan kolonial dan kebijakan desentralisasi pendidikan pascareformasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan yang ada dengan menganalisis *Batak Day* tidak hanya sebagai program pelestarian budaya lokal, tetapi juga sebagai strategi mengembalikan legitimasi bahasa, budaya, dan pengetahuan Batak ke dalam ruang pendidikan formal sebagai bagian dari proses dekolonisasi pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagaimana dikemukakan oleh (Kuntowijoyo, 2003), yang meliputi lima tahapan, yaitu pemilihan tema, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode ini digunakan untuk menganalisis perkembangan program *Batak*

Day sebagai bagian dari kebijakan pendidikan berbasis budaya lokal di Kabupaten Samosir pada periode 2018–2024.

Tahap pertama adalah pemilihan tema, yaitu penentuan fokus penelitian mengenai implementasi *Batak Day* dalam perspektif pelestarian budaya dan dekolonisasi pendidikan. Tahap kedua, heuristik, dilakukan melalui pengumpulan sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui observasi lapangan selama pelaksanaan pengabdian masyarakat selama satu bulan di SMP Negeri 3 Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Observasi memungkinkan penulis mengamati secara langsung pelaksanaan *Batak Day*, penggunaan bahasa Batak dalam kegiatan sekolah, serta berbagai bentuk ekspresi budaya yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Sumber sekunder diperoleh melalui penelusuran buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sejarah pendidikan, desentralisasi pendidikan, pelestarian budaya, dan dekolonisasi pengetahuan.

Tahap kritik sumber dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitas data yang diperoleh, baik dari hasil observasi maupun sumber pustaka. Selanjutnya, pada tahap interpretasi, data hasil observasi tidak dianalisis secara terpisah, melainkan diklasifikasikan ke dalam tema-tema, seperti implementasi *Batak Day*, penggunaan bahasa Batak, dan pelestarian budaya di sekolah. Tema-tema kemudian dibandingkan dan diintegrasikan dengan temuan dari studi pustaka untuk menjelaskan hubungan antara praktik pendidikan di Kabupaten Samosir dengan perkembangan kebijakan desentralisasi pendidikan serta konsep dekolonisasi pendidikan. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian secara sistematis berdasarkan hubungan antara fakta lapangan, dokumen

kebijakan, dan kajian akademik sehingga menghasilkan narasi sejarah yang utuh.

Selain pengalaman pengabdian, penelitian ini juga didukung oleh studi pustaka yang dilakukan secara sistematis. Studi pustaka mencakup penelusuran buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pelestarian budaya, desentralisasi pendidikan, dan dekolonisasi pengetahuan. Data dari pengalaman lapangan dan studi pustaka dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menempatkan praktik pendidikan di Kabupaten Samosir dalam konteks sejarah dan kebijakan pendidikan Indonesia. Validitas dan kredibilitas data dijaga melalui perbandingan antara temuan lapangan dan sumber-sumber akademik, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di setiap otonomi daerah muncul berbagai inisiatif pendidikan berbasis kearifan lokal (Sari & Yanti, 2023), salah satunya *Batak Day* di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Program ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap sistem pendidikan yang selama beberapa dekade terpusat di tangan pemerintah pusat. *Batak Day* merepresentasikan semangat baru desentralisasi, di mana kebudayaan lokal tidak lagi dipandang sekadar ornamen tradisi, melainkan sumber nilai dan pengetahuan yang relevan bagi pembentukan karakter generasi muda. Secara praktis, kebijakan ini dilaksanakan setiap hari Kamis di seluruh sekolah dasar dan menengah pertama di Kabupaten Samosir, seperti di SD Negeri 5 Partungko Naginjang dan SMP Negeri 3 Harian.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan yang digagas oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Samosir. Melalui kegiatan ini, pendidikan berupaya mereposisi dirinya sebagai ruang sosial di mana nilai-nilai budaya lokal dapat hidup berdampingan dengan pengetahuan modern. *Batak Day* tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas kultural, tetapi juga sebagai refleksi dari perubahan paradigma pendidikan Indonesia yang bergerak dari sentralisasi menuju desentralisasi, dari seragam menjadi beragam, dan dari pengendalian menuju partisipasi.

Implementasi *Batak Day* memberikan dampak yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga edukatif. Bagi peserta didik, program *Batak Day* menjadi media untuk mengenal, menggunakan, dan mengapresiasi kembali bahasa, pakaian adat, kesenian, serta nilai-nilai budaya Batak dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman yang mendorong tumbuhnya rasa bangga terhadap identitas budaya lokal sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa budaya daerah merupakan bagian penting dari warisan yang perlu dilestarikan. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan identitas kultural peserta didik melalui pengalaman belajar yang kontekstual.

Di lingkungan sekolah, *Batak Day* turut membangun budaya sekolah yang lebih inklusif terhadap pengetahuan lokal. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai agen transmisi budaya yang mengintegrasikan bahasa dan tradisi Batak ke dalam proses pembelajaran. Kondisi yang memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat karena praktik budaya yang sebelumnya lebih banyak berlangsung di lingkungan keluarga dan komunitas adat kini memperoleh

ruang yang sama dalam pendidikan formal. Dari perspektif dekolonisasi pendidikan, program *Batak Day* menunjukkan adanya pergeseran orientasi pendidikan dari sistem yang cenderung menyeragamkan pengetahuan menuju pendidikan yang memberikan legitimasi terhadap bahasa, budaya, dan pengetahuan lokal sebagai bagian yang setara dalam proses pembelajaran.

Pada hari pelaksanaan, seluruh siswa dan guru diwajibkan mengenakan kain ulos dan sortali. Guru-guru menyambut siswa di gerbang sekolah dengan tradisi sapa dan salam khas Batak. Sebelum proses pembelajaran dimulai, seluruh warga sekolah menarikan tari tor-tor, menyanyikan ende (nyanyian tradisional Batak), dan mengucapkan umpasa (peribahasa Batak). Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, bahasa Batak Toba (Lubis et al., 2025) digunakan sebagai bahasa komunikasi utama. Menurut keterangan Sehati Putri Girsang, guru agama di SMP Negeri 3 Harian, kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan mendapat sambutan positif dari guru maupun siswa. Kegiatan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya mengembalikan fungsi pendidikan sebagai ruang pewarisan pengetahuan lokal dan pembentukan identitas kultural di kalangan generasi muda.

Program *Batak Day* memiliki makna yang jauh melampaui ritual budaya. Pemakaian ulos dan sortali, serta pelaksanaan tari tor-tor, merupakan bentuk pengakuan terhadap identitas kultural yang telah lama terpinggirkan. Ulos melambangkan kehangatan dan kasih sayang, sedangkan tor-tor menggambarkan dinamika kehidupan dan solidaritas sosial masyarakat Batak. Dengan mengenakan dan menarikan simbol-simbol ini di ruang pendidikan, sekolah tidak hanya mengajarkan budaya

sebagai pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang melekat dalam Tradisi Batak. Selain itu, penggunaan bahasa Batak Toba dalam kegiatan belajar mengajar menjadi sarana penting untuk memperkuat rasa memiliki terhadap identitas lokal. Bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga wadah nilai-nilai, sejarah, dan cara berpikir suatu masyarakat. Dengan menghidupkan kembali bahasa daerah di sekolah, *Batak Day* berperan dalam memperkuat ikatan sosial dan menanamkan rasa bangga terhadap warisan budaya sendiri.

Konsep *dekolonisasi pengetahuan* yang diperkenalkan oleh Boaventura de Sousa Santos (Santos, 2016) menjelaskan bahwa dunia modern telah mengalami *epistemicide*, pembunuhan terhadap pengetahuan lokal akibat dominasi epistemologi Barat. Dalam konteks Indonesia, bentuk kontemporer dari *epistemicide* terlihat ketika bahasa dan budaya lokal disingkirkan dari ruang pendidikan dan digantikan oleh bahasa Indonesia serta Inggris yang dianggap lebih modern. *Batak Day* hadir sebagai bentuk pelestarian terhadap situasi tersebut. Program ini mengembalikan otoritas pengetahuan kepada masyarakat lokal dengan menempatkan kebudayaan Batak sebagai sumber nilai dalam pendidikan. Tindakan seperti memakai ulos, menari tor-tor, atau menggunakan bahasa Batak di kelas bukanlah kegiatan folkloristik belaka, melainkan bentuk *re-claiming knowledge* mengambil kembali hak untuk mendefinisikan pengetahuan menurut cara pandang dan nilai-nilai masyarakat Batak sendiri. Dengan demikian, *Batak Day* bukan hanya simbol pelestarian budaya, tetapi juga praktik *epistemological resistance* terhadap sistem pendidikan modern yang seringkali menstandarkan pengetahuan menurut kriteria Barat. Menyatakan bahwa pendidikan dapat menjadi ruang untuk

mengembalikan keseimbangan antara ilmu pengetahuan global dan kearifan lokal.



Gambar 1: Pelaksanaan Batak Day di SMP Negeri 3 Harian Kabupaten Samosir

Batak Day sebenarnya memiliki akar dalam sejarah panjang pendidikan *vernacular* di Indonesia. Pada dekade 1930-an, pemerintah kolonial Belanda sempat menerapkan kebijakan *indigenisasi* Pendidikan (Suwignyo, 2013), yaitu penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah lokal. Walau kebijakan tersebut lebih bersifat pragmatis dan bertujuan efisiensi administrasi, secara tidak langsung membuka ruang bagi guru-guru lokal untuk mentransmisikan nilai-nilai komunitas melalui bahasa ibu. *Batak Day* dapat dipahami sebagai kelanjutan dari tradisi *indigenisasi*, namun dengan semangat yang berbeda. Jika pada masa kolonial kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai alat kontrol, maka kini *Batak Day* digunakan sebagai sarana emansipasi dan pembebasan kultural. Program ini menjembatani kurikulum nasional dengan kehidupan sosial masyarakat Batak, menciptakan bentuk pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sejarah dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Dalam konteks kebijakan nasional, *Batak Day* menandai pergeseran dari sistem pendidikan *top-down* yang dikendalikan pusat menuju model

bottom-up yang tumbuh dari masyarakat. Disdikpora Samosir sebagai inisiator menegaskan bahwa pelestarian budaya merupakan bagian integral dari pembangunan manusia. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai sarana penyeragaman nilai, melainkan sebagai proses pembentukan karakter yang menghargai keberagaman. Model semacam ini berpotensi menginspirasi daerah lain di Indonesia. Misalnya, Sasak Day di Lombok atau *Javanese Heritage Day* di Jawa Tengah dapat dikembangkan dengan prinsip serupa memadukan kurikulum nasional dengan praktik budaya daerah masing-masing. Pendidikan berbasis lokal tidak bertentangan dengan semangat kebangsaan, melainkan memperkaya makna nasionalisme dengan mengakui pluralitas budaya sebagai kekuatan bangsa.

Walaupun *Batak Day* membawa dampak positif, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana memasukkan nilai-nilai budaya Batak ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran agar program ini tidak berhenti pada tataran simbolik. Dalam *Conceptual Challenges for the Decolonization of Knowledge in Global Higher Education*, dekolonisasi pengetahuan tidak boleh hanya menjadi seremoni, melainkan harus menyentuh cara berpikir, struktur pengajaran, dan paradigma belajar (Seats, 2022). Selain itu, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dalam hal anggaran, pelatihan guru, serta pengembangan bahan ajar berbahasa Batak. Penggunaan media digital dan teknologi pendidikan juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas dampak *Batak Day*. Misalnya, pembuatan konten edukatif berbahasa Batak di media sosial atau platform belajar daring dapat menjadi strategi modern untuk memperkenalkan budaya Batak kepada generasi muda.

Sebagaimana dijelaskan oleh Nababan (Nababan, 1991), Indonesia merupakan negara multibahasa dengan ratusan bahasa daerah. Dalam sistem pendidikan, terdapat tiga kategori utama bahasa yang digunakan: bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama, bahasa daerah yang digunakan secara terbatas di kelas-kelas awal dan sebagai muatan lokal, serta bahasa asing terutama bahasa Inggris untuk komunikasi global. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat pembentukan identitas nasional dan pengembangan intelektual, sementara bahasa daerah berfungsi mempertahankan identitas kultural dan nilai-nilai lokal. Di sisi lain, bahasa asing mendukung modernisasi dan keterhubungan internasional. Melalui pendidikan, Indonesia diharapkan dapat membentuk masyarakat *bilingual* atau bahkan *multilingual* yang mampu menyeimbangkan pelestarian budaya lokal, penguatan identitas nasional, dan keterbukaan terhadap globalisasi. *Batak Day* memperlihatkan bagaimana keseimbangan ini dapat diwujudkan secara konkret di ruang kelas. Program ini mengintegrasikan bahasa Batak Toba tanpa meniadakan peran bahasa Indonesia, sehingga peserta didik tetap mampu berinteraksi secara nasional maupun global tanpa kehilangan akar budaya Batak. Penggunaan ulos Batak Toba, sortali, serta pelaksanaan tari tor-tor di sekolah bukan hanya aktivitas kultural semata, melainkan strategi pendidikan yang menanamkan kebanggaan identitas. Melalui simbol-simbol tersebut, siswa belajar menghargai nilai-nilai gotong royong, kesopanan, dan rasa hormat kepada leluhur. Dengan demikian, sekolah berfungsi tidak hanya sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat kebudayaan terus hidup dan berkembang.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi *Batak Day* tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan budaya yang bersifat

seremonial, tetapi telah mengintegrasikan bahasa, simbol, dan praktik budaya Batak ke dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari. Selama observasi di SMP Negeri 3 Kecamatan Harian, penggunaan bahasa Batak dalam komunikasi antara guru dan peserta didik, pemakaian pakaian adat setiap hari Kamis serta penyelenggaraan tarian dan musik tradisional menjadi bagian dari lingkungan belajar yang secara aktif menghidupkan kembali identitas budaya lokal. Praktik-praktik yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan lokal tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap di luar sekolah, melainkan memperoleh legitimasi sebagai bagian dari proses pendidikan formal.

Temuan sejalan dengan konsep dekolonisasi pendidikan, yang memandang pendidikan sebagai ruang untuk mengembalikan posisi pengetahuan lokal yang selama ini tersisih oleh dominasi epistemologi Barat (Santos, 2018). Dekolonisasi tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap ilmu pengetahuan modern, melainkan sebagai upaya menciptakan hubungan yang lebih setara antara pengetahuan universal dan pengetahuan lokal. Implementasi *Batak Day* di Kabupaten Samosir memperlihatkan proses tersebut melalui pengakuan terhadap bahasa Batak sebagai media komunikasi, budaya Batak sebagai sumber belajar, dan tradisi lokal sebagai bagian dari pengalaman pendidikan peserta didik. Dengan demikian, program ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga mereposisi budaya lokal sebagai sumber pengetahuan yang memiliki nilai akademik dan pedagogis.

Batak Day dapat dipahami sebagai bentuk dekolonisasi pendidikan karena menghadirkan kembali bahasa, budaya, dan pengetahuan masyarakat Batak ke dalam ruang sekolah yang selama ini lebih banyak

didominasi oleh kurikulum nasional. Transformasi ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis budaya lokal bukan sekadar upaya menjaga warisan budaya, tetapi juga strategi untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan budaya, dan berdaulat secara pengetahuan. Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah menjadi faktor penting agar *Batak Day* tidak hanya dipertahankan sebagai program daerah, tetapi juga dapat menjadi model pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia (Situmeang et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program *Batak Day* merupakan implementasi nyata pendidikan berbasis budaya lokal yang lahir dalam konteks desentralisasi pendidikan pascareformasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan kajian pustaka, pelaksanaan *Batak Day* tidak hanya menghadirkan kembali penggunaan bahasa Batak, pakaian adat, seni, dan tradisi lokal di lingkungan sekolah, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap pengetahuan lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran formal. Temuan memperlihatkan bahwa sekolah berperan sebagai ruang reproduksi budaya sekaligus ruang dekolonisasi pendidikan, melalui upaya mengembalikan bahasa, budaya, dan pengetahuan lokal yang selama ini kurang memperoleh tempat dalam sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada pengetahuan universal. Dengan demikian, dekolonisasi pendidikan dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai penolakan terhadap ilmu pengetahuan modern, melainkan sebagai proses membangun hubungan yang lebih setara antara pengetahuan global dan kearifan lokal dalam praktik pendidikan.

Kontribusi penelitian terletak pada analisis *Batak Day* yang tidak hanya dipahami sebagai program pelestarian budaya, tetapi juga sebagai praktik dekolonisasi pendidikan yang dikaji melalui perspektif sejarah pendidikan dan kebijakan desentralisasi. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis budaya lokal mampu memperkuat identitas budaya peserta didik sekaligus memperkaya praktik pembelajaran yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, pengalaman Kabupaten Samosir dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan bahasa, budaya, dan pengetahuan lokal sesuai karakteristik masing-masing daerah. Dengan dukungan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, pendidikan berbasis budaya lokal berpotensi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan budaya, dan berdaulat secara pengetahuan.

ACKNOWLEDGMENTS

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada keluarga besar SMP Negeri 3 Harian, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, khususnya Bapak Baren M. Damani selaku Kepala Sekolah, Ibu Sehati Putri Girsang selaku Guru Agama, serta seluruh dewan guru dan staf atas segala bantuan, dukungan, dan dedikasi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Futaqi, S. (2018). *Dekolonisasi Pendidikan Islam di Indonesia*.
Heriando H. Manik, Masniar Hernawati Sitorus, Martua Sihalohe, Rusmauli Simbolon, & Harisan Boni Firmando. (2024). Peran Sekolah Adat Dalam Melestarikan Kebudayaan Batak Toba Di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik. *Morfologi: Jurnal Ilmu*

- Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(3), 11–22.
<https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i3.593>
- Hutahayan, S. G. M., & Nainggolan, E. S. (2026). *Efektivitas Program Batak Day dalam Penguatan Karakter Kristiani Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Samosir*. 10(1).
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah*. Tiara Wacana.
- Lubis, D. L. A., Nissa, L. C., Sitinjak, A. W., Nauli, G., & Siallaan, L. (2025). *Peran Bahasa Batak Toba Dalam Pelestarian Pengetahuan Tradisional*.
- Nababan, P. W. J. (1991). Language in education: The case of Indonesia. *International Review of Education*, 37(1), 115–131.
<https://doi.org/10.1007/BF00598171>
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultural untuk menumbuhkan nilai toleransi agama di indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272–303.
- Safei, S., & Hudaidah, H. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968–1998). *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.29408/jhm.v7i1.3253>
- Santos, B. de S. (2016). *Epistemologies of the South: Justice against epistemicide*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315634876>
- Sari, N., & Yanti, S. F. (2023). Sejarah Lokal dan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(2), 114–132. <https://doi.org/10.15548/thje.v4i2.5650>
- Seats, M. R. (2022). The voice(s) of reason: Conceptual challenges for the decolonization of knowledge in global higher education. *Teaching in Higher Education*, 27(5), 678–694.
<https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1729725>
- Suwignyo, A. (2013). The Great Depression and the changing trajectory of public education policy in Indonesia, 1930–42. *Journal of Southeast Asian Studies*, 44(3), 465–489.
<https://doi.org/10.1017/S0022463413000337>
- Suwignyo, A. (2019). *Pendidikan, kekuasaan dan kolonialisme*. Quantum jogja.
- Yuhdi, A., Manurung, A. M., Nduru, E. B., & Ganda, I. (2024). *Analisis Pengaruh Penguasaan Bahasa Batak dalam Kemampuan Berbahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Simanindo*. 09.